

PROFIL DESA 2025

**DESA JERIJI
KECAMATAN TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG**

TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan HidayahNya Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Desa Jeriji Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Buku ini memuat garis besar gambaran keadaan Desa Jeriji di Bidang Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. Melalui buku ini diharapkan memberi gambaran keadaan yang ada di lapangan serta memudahkan Tim Penilai dalam mengetahui gambaran Desa Jeriji Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kami menyadari buku Profil ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan buku Profil ini. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Pj. Kepala Desa Jeriji

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'armanto', with a long horizontal line extending to the left and a vertical line extending downwards to the right.

ARMANTO, S.I.P

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Kelurahan, Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Data profil desa dan kelurahan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) dan Penyusunan RKPDDes. Data Profil Desa dan Kelurahan juga sebagai acuan dalam perencanaan dan peluncuran program di daerah.

Karena itu, ketersediaan data dasar profil desa dan kelurahan sudah menjadi kebutuhan seluruh pelaku pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa **Jeriji**. Dengan demikian, berbicara program pemulihan, rekonstruksi, dan rehabilitasi masyarakat melalui strategi pemberdayaan masyarakat, harus didasarkan atas data yang akurat, terukur, terpercaya dan terkini. Selanjutnya berbicara soal data yang valid, reliable, komprehensif dan integral, secara sistematis profil desa dan kelurahan mampu menyediakan secara cepat, tepat, murah, akurat dan terpercaya.

2. Maksud dan Tujuan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit mengamanatkan bahwa dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat, desa perlu dibentuk dengan mempertimbangkan syarat administratif, syarat teknis dan syarat kewilayahan sehingga dapat mengembangkan tugas pokok dan urusan yang dilimpahkan dalam bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta pembinaan lembaga kemasyarakatan. Hal ini berarti dalam rangka percepatan keberdayaan dan akselerasi kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memerlukan dukungan data profil setiap desa dan kelurahan yang akurat untuk memverifikasi persyaratan serta klarifikasi tugas yang dilimpahkan agar memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan ketersediaan data potensi sumber daya dan perkembangannya secara obyektif, sah dan akurat, maka berbagai kebijakan, program dan kegiatan percepatan keberdayaan dan akselerasi kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pengembangan social budaya masyarakat dalam skala nasional, provinsi, kabupaten/kota,

kecamatan, desa dan kelurahan dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara tepat, cepat, efisien, efektif serta memuaskan masyarakat yang dilayani. Berbagai landasan konstitusional kebutuhan akan ketersediaan data potensi perkembangan masyarakat di atas mengidentifikasikan bahwa pada setiap level pemerintahan, harus tersedia data profil desa dan kelurahan sebagai data dasar bersama untuk mendukung upaya pemerintah dan pemerintahan daerah serta masyarakat dan dunia usaha dalam sinergitas kebijakan dan program percepatan keberdayaan dan akselerasi kesejahteraan masyarakat di setiap desa dan kelurahan.

3. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Profil Desa ini adalah :

1. Tersusunnya Profil Desa Tahun 2024;
2. Terdatanya Data Dasar Keluarga

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA JERIJ

2.1. Sejarah Desa Jeriji

Melihat letak geografis serta tata ruang Jalan Desa Jeriji, maka kita dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa Desa Jeriji, dibangun dengan perencanaan yang matang oleh pengelir Desa. Di Desa Jeriji tidak adanya suatu peninggalan kebudayaan sebagaimana Desa-Desa lain yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, sehingga tidak terlalu sulit untuk meneliti kapan Desa Jeriji terbentuk. Pembukaan / Pembabatan tanah baru disekitar Desa Jeriji dan sebagai lahan untuk perkebunan, terbentuknya Desa Jeriji atas perkembangan dari ajaran Hindu, Budha yang berasal dari Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

Pada tahun 1930 keadaan penduduknya disaat itu sangatlah miskin dan mendapat serangan dari jajahan Belanda disamping tanah yang kritis, rawa-rawa, Hampan Padang yang sulit untuk dikelola oleh penduduk Desa Jeriji pada saat itu. Jeriji yang dahulu disebut juga nama lain DAERAH PERTAHANAN dan DAERAH PEMUKIMAN PENDUDUK yang terletak Paija Raout pada Tahun 1845-1846 di pinggirian sungai yang di pimpin dari DEMANG BATIN JIWAD, yang berada di Momok Balai Kambang DEMANG BATIN KETAPI, yang berada di Ketapi DEMANG BATIN GERUNGANG, yang berada di Gerungang pada semasa itu ketiga kekuasaan batin ini tunduk kepada pimpinan DEPATI yang berada di Kota Toboali dalam perjuangan untuk mempertahankan jajahan dari serangan Belanda dan Ketiga Batin ini bersama dengan BATIN TIKAL yang berada di Gudang (Simpang Rimba) juga ikut dan mempertahankan daerah Bangka Kota sebagai mana pada saat itu adanya serangan jajahan dari Belanda di Daerah Bangka Kota.

Semasa belanda membuat jalan baru yang ditetapkan 5 KM diadakan mebuat pos istirahat belanda di sebut dengan PETALING JAYA yang dikepalai oleh (BAKIR, SUROM, MULAN DAN H.HAMDAN) pada semasa Belanda dan pada masa jajahan jepang dikepalai oleh (H. HAMDAN) Atau sebutan gegading semasa itu dan bermata pencaharian belum dapat di pergunakan karena ada halangan yang sangat berat dan sebagian penduduk yang ingin adanya kemajuan dapat menanam ubi kayu dan berladang padi sebagi bahan makanan pokok dan camapuran yang sangat menyedihkan barang-barang ekonomi masyarakat sangat minim. Pada tahun 1940 adanya nama KAMPUNG DJERIDJI ini adalah kayu kayan yang sangat besar berjajaran disepanjang pingiran Jalan yang di Kepalai oleh Lurah/ (YUSMAN) pimpinan pada masa Tahun 1986.

Dan sebagai pimpinan pengganti pada masa pergantian yang baru dari tahun 1976 sampai dengan 2008 nama Kampung di ganti dengan sebutan Desa Jeriji di Pimpin oleh (H. ANSYORI NORMAN), setelah 23 tahun pimpinan H. Ansyori Norman mengundurkan diri dari Kepala Desa dikerenakan Mencalonkan diri sabagai DPRD Kabupaten Bangka Saletan, dan pimpinan selanjutnya yang diangkat dan dikepalai oleh ARMANTO selaku (Pj. Kepala Desa Jeriji) dari Tahun 2009 – 2010 oleh BUPATI BANGKA SELATAN untuk memimpin kekosongan Pemimpin Desa Jeriji semasa itu. Dan tahun 2010 terpilihlah oleh masyarakat Pemimpin Desa Jeriji yaitu DARMADI NORMAN (Kepala Desa Jeriji Difinitif) pada tahun 2010 - 2016 dan dimana masa tersebut telah habis masa jabatan beliau maka ada kekosongan pemimpin terangkatlah ARMANTO sebagai (Pj. Kepala Desa Jeriji) 2016 - 2017 yang mana perjalanan politik waktu

berjalan dengan baik dan menjabatlah sampai Pelantikan Kepala Desa yang baru (Difinitif).

Waktu demi waktu pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2017 terjadilah pemilihan umum kepala desa Jeriji yang di ikuti oleh 2 orang kandidat yaitu saudara Nomor Urut 1. Saudara Yanto dan Nomor Urut 2. Saudara A. Iswandi,SP dan terpilihlah dari salah satu kandidat yaitu Nomor Urut 2 Yaitu A. Iswandi SP selaku (Kepala Desa Jeriji Difinitif) yang terpilih dan dilantiklah beliau selaku pemimpin yang membuka ide-ide kemajuan masyarakat Desa yang akan datang. Pada masa sekarang wilayah Jeriji atas Tebeng ini berada dalam dua wilayah 2 dusun, yaitu Dusun Aik Jeriji dan Dusun Aik Jeriji Barat. Selain bertambah panjangnya wilayah perkampungan Jeriji, pada 1970-an, juga mulai terbentuk perkampungan penduduk baru dalam wilayah Desa Jeriji. Perkampungan tersebut oleh masyarakat Jeriji disebut sebagai Jeriji Kecet atau Jeriji Bawah Tebeng. Yang kemudian, sejak 1980-an pertengahan, Kampung Jeriji Kecet atau Jeriji Bawah Tebeng ini berubah panggilan menjadi Jeriji Pesantren, setelah berdirinya Pesantren Modern Al-Hidayah di wilayah tersebut. Wilayah Jeriji Pesantren ini sekarang menjadi wilayah Dusun Pesantren Desa Jeriji.

2.2. Administrasi Pemerintahan Desa

Desa **Jeriji** terdiri dari:

- Dusun : 5 (Lima) Dusun
- Rukun tetangga : 12 (Dua Belas) RT

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur kewilayahan.

- Kepala Desa : 1 orang
- Perangkat Desa
 - Sekretaris Desa : 1 orang
 - Kepala Urusan : 3 orang
 - Kepala Seksi : 3 orang
- Unsur kewilayahan : orang

BAB III
DATA POKOK DESA/KELURAHAN
BULAN JANUARI TAHUN 2025

| | |
|--------------------------------|---|
| Kode Desa (Kode PUM) | : 1903012005 |
| Nama Desa/Kelurahan | : JERIJI |
| Kecamatan | : TOBOALI |
| Kabupaten/Kota | : BANGKA SELATAN |
| Provinsi | : BANGKA BELITUNG |
| Tahun Pembentukan | : 1979 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : UU Nomor 5 Tentang Pemerintah Desa Peta |
| Resmi Wilayah | : |
| Koordinat | : Longitude Bujur: 106.48915 Latitude :-2.873894 |
| Batas Wilayah: | |
| a. Sebelah Utara | : Desa Serdang |
| b. Sebelah Selatan | : Kelurahan Utara |
| c. Sebelah Barat | : Desa Rias |
| d. Sebelah Timur | : Hutan Cadang Desa Kepoh |

A. PERSONIL

1. Kepala Desa/Lurah

- a. Nama : ARMANTO,S.I.P
- b. Pangkat / Gol : Penata Muda/IIIa
- c. N I P : 198109072010011010
- d. Pendidikan Terakhir : S1
- e. Pelatihan yang pernah diikuti : Pengelolaan Keuangan Desa
: Aplikasi Siskeudes
: Aplikasi Sipdes
- f. Jenis kelamin : Laki - laki

2. Sekretaris Desa

- a. Nama : Hasan Basri
- b. Pangkat / Gol : -
- c. N I P : -
- d. Pendidikan Terakhir : SMA
- e. Pelatihan yang pernah diikuti : Pengelolaan Keuangan Desa
: Aplikasi Siskeudes
: Aplikasi Sipades
- f. Jenis kelamin : Laki-laki

3. Ketua B P D

- a. Nama : Dung
- b. Pendidikan Terakhir : SMA
- c. Pelatihan yang pernah diikuti : Penelolaan Keuangan Desa
: -
: -
- d. Jenis kelamin : Laki -l aki

B. DATA UMUM

1. Tipologi Desa/Kelurahan : Pertanian,Perkebunan,KerajinannNelayan
2. Klasifikasi Desa/Kelurahan : Desa Swakarya
3. Kategori Desa/Kelurahan : Desa Mandiri
4. Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Tanam : Kelapa Sawit , Karet,Lada
5. Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Ekonomi : Kelapa Sawit,Karet dan Lada
6. Luas Wilayah :23.000 ha
 - a. Lahan Sawah : 400 ha
 - b. Lahan Ladang : 500 ha
 - c. Lahan Perkebunan : 19.000 ha
 - d. Lahan Peternakan : 25 ha
 - e. Hutan : 2.577 ha
 - f. Waduk/Danau/Situ : 0 ha
 - g. Lahan Lainnya : 498 ha
7. Jumlah Sertifikat Tanah/Luas Tanah : 3.500 ha/7.000 ha
8. Luas Tanah Kas Desa : 200 ha
 - a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 20 KM
 - b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 32 KM
 - c. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 32 KM
 - d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 118 KM

| | | |
|--------------------------------|--------------|--|
| 10. Jumlah Kepala Keluarga | : 819 Jiwa | |
| a. Keluarga Pra Sejahtera | : 26 Jiwa | |
| b. Keluarga Sejahtera I | : 531 Jiwa | |
| c. Keluarga Sejahtera II | : 192 Jiwa | |
| d. Keluarga Sejahtera III | : 40 Jiwa | |
| e. Keluarga Sejahtera III plus | : 30 Jiwa | |
| 11. Jumlah Penduduk | : 2.534 Jiwa | |
| a. Laki-laki | : 1.337 Jiwa | |
| b. Perempuan | : 1.197 Jiwa | |
| c. Usia 0 – 17 | : 541 Jiwa | |
| d. Usia 18 – 56 | : 1.754 Jiwa | |
| e. Usia 56 ke-atas | : 272 Jiwa | |
| 12. Pekerjaan/Mata Pencaharian | | |
| a. Karyawan | : 656 Jiwa | |
| - Pegawai Negeri Sipil | : 45 Jiwa | |
| - TNI/Polri | : 3 Jiwa | |
| - Swasta | : 103 Jiwa | |
| - BUMN | : - | |
| - BUMD | : - | |
| - Honorer | : 42 Jiwa | |
| a. Wiraswasta/pedagang | : 102 Jiwa | |
| b. Petani | : 595 Jiwa | |
| c. Buruh Tani | : 44 Jiwa | |
| d. Nelayan | : - | |
| e. Peternak | : - | |
| f. J a s a | : 1 Jiwa | |
| g. Pengrajin | : 2 Jiwa | |
| h. Pekerja seni | : - | |
| i. Pensiunan | : 5 Jiwa | |
| j. Lainnya | : 1.640 Jiwa | |
| k. Tidak bekerja/penganggur | : 364 Jiwa | |

13. Rasio Pendidikan dan Kesehatan

a. Rasio Murid dan Guru

| | | | |
|--|---|----|-------|
| - Taman Kanak-kanak (225/21) | : | 4 | Orang |
| - Sekolah Dasar / Sederajat (1265/87) | : | 24 | Orang |
| - SMP / Sederajat (89/14) | : | 27 | Orang |
| - SMA / Sederajat (722/74) | : | 29 | Orang |
| - Akademi | : | - | |
| - Sarjana | : | 84 | |
| - Pasca Sarjana | : | - | |

b. Rasio Penduduk dan Tenaga Kesehatan

| | | | |
|-----------------------------|---|---|-------|
| - Dokter Umum | : | - | Orang |
| - Dokter Spesialis | : | - | Orang |
| - Bidan/Dukun Bayi Terlatih | : | 2 | Orang |
| - Mantri Kesehatan | : | - | |
| - Perawat | : | 3 | Orang |

14. Tingkat Pendidikan Masyarakat

a. Lulusan pendidikan umum : 2.534 Orang

| | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|
| - Sekolah Dasar/sederajat | : | 1.058 | Orang |
| - SMP / Sederajat | : | 321 | Orang |
| - SMA / Sederajat | : | 332 | Orang |
| - Akademi/D1-D3 | : | 53 | Orang |
| - Sarjana S1 | : | 65 | Orang |
| - Sarjana S2 | : | 5 | Orang |
| - Sarjana S3 | : | 1 | Orang |

b. Lulusan pendidikan khusus : 21 Orang

| | | | |
|------------------------|---|----|-------|
| - Pondok Pesantren | : | 10 | Orang |
| - Pendidikan Keagamaan | : | 7 | Orang |
| - Sekolah Luar Biasa | : | - | |
| - Kursus Keterampilan | : | 4 | Orang |

c. Tidak /Belum bersekolah : 270 Orang

d. Belum Tamat SD/Sederajat : 430 Orang

15. Sarana dan Prasarana :

- a. Kantor Desa : Ada
- b. Prasarana Kesehatan
 - Puskesmas : -
 - Puskesmas Pembantu : 1 Unit
 - Poskesdes : -
 - Posyandu dan Polindes : 2 Unit
- c. Prasarana Pendidikan
 - Perpustakaan Desa : 1 Unit
 - Gedung Sekolah PAUD : -
 - Gedung Sekolah TK : 1 Unit
 - Gedung Sekolah SD : 1 Unit
 - Gedung Sekolah SMP : 1 Unit
 - Gedung Sekolah SMA : 1 Unit
 - Gedung Perguruan Tinggi : -
- d. Prasarana Ibadah
 - Mesjid : 1 Unit
 - Mushola : 4 Unit
 - Gereja : -
 - Pura : -
 - Vihara : -
 - Klenteng : -
- e. Prasarana Umum
 - Olahraga : 4 Unit
 - Kesenian/budaya : 1 Unit
 - Balai pertemuan : 1 Unit
 - Sumur desa : 6 Unit
 - Pasar desa : -
 - Lainnya : -
- f. Prasarana Transportasi
 - Jalan Desa (Aspal/Beton) : -
 - Jalan Kabupaten (Aspal/Beton) : 10 Km
 - Jalan Provinsi (Aspal/Beton) : -
 - Jalan Nasional (Aspal/Beton) : 6 Km
 - Tambatan Perahu : -
 - Perahu Motor : 4 Unit
 - Lapangan Terbang : -
 - Jembatan Besi : -

g. Prasarana Air Bersih

- Hidran Umum : -
- Penampung Air Hujan : -
- PAMSIMAS : 2 Unit
- Pengolahan Air Bersih : -
- Sumur Gali : 631 Buah
- Sumur Pompa : -
- Tangki Air Bersih : 242 Buah

h. Prasarana Sanitasi dan Irigasi

- MCK Umum : 0 Buah
- Jamban Keluarga : 670 Buah
- Saluran Drainase : 917 Meter
- Pintu Air : - Unit
- Saluran Irigasi : 25.400 Meter

C. KEUANGAN

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa/Kelurahan (a+b+c) | : Rp 2.382.248.905 |
| a. Pendapatan Asli Desa/Kelurahan | : Rp 6.500.000 |
| - Hasil Usaha BUMDes | : Rp 5.000.000 |
| b. Bantuan yang diterima Desa/Kelurahan | : Rp 2.368.300.791 |
| - Pemerintah | : Rp 2.168.300.791 |
| - Provinsi | : Rp 0,00 |
| - Kabupaten/Kota | : Rp,200.000.000 |
| - Pungutan / Retribusi | : Rp,0,00 |
| - Hibah/Swadaya | : Rp 0,00 |
| - Pendapatan lainnya | : Rp ,2.448.114 |
| c. Bantuan lain tidak mengikat | : Rp 0,00 |
| d. SILPA / SIKPA | : Rp 190.683.500,26 |
| e. Dana Cadangan | : Rp 0,00 |
| 2. Belanja Desa/Kelurahan | : Rp2.572.932.405,26 |
| a. Belanja Rutin | : Rp 2.358.517.126 |
| b. Belanja Tidak Rutin | : Rp 104.153.005,25 |

D. KELEMBAGAAN

1. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau sebutan lain

- Jumlah pengurus : 5 Orang
- Jumlah anggota : 12 Orang
- Jumlah kegiatan per bulan : 1 Kegiatan
- Jumlah dana yang dikelola : 2.000.000 Rupiah

2. Lembaga Adat

- Pemangku Adat : -
- Kepengurusan Adat : 2 Orang
- Simbol Adat : -
- Kegiatan Adat : 2 Kegiatan

3. TP PKK

- Jumlah pengurus : 3 Orang
- Jumlah anggota : 28 Orang
- Jumlah kegiatan per bulan : 1 Kegiatan
- Jumlah buku administrasi yang dikelola : 6 Buah
- Jumlah dana yang dikelola : Rp 5.000.000

4. BUMDes

- Jumlah/Jenis BUMDes : 1 Unit/ 2 Jenis
- Jumlah Modal Dasar BUMDes : Rp 150.000.000
- Jumlah Keuangan yang dikelola BUMDes : Rp 150.000.000

5. Karang Taruna

- Jenis Kegiatan : 1 Jenis
- Jumlah Pengurus : 3 Orang
- Jumlah Anggota : 25 Orang

6. RT/RW

- Jumlah RW/Dusun : 6 RW/Dusun 5
- Jumlah RT : 12RT
- Jumlah bantuan yang diterima RW dalam sebulan : Rp12.000.000,-
- Jumlah bantuan yang diterima RT dalam sebulan : Rp6.000.000;

7. Lembaga Kemasyarakatan lainnya: 1 Lembaga

E. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Jumlah Anggota Linmas | : 5 Orang |
| 2. Jumlah Pos Kamling | : 3 Buah |
| 3. Jumlah Operasi Penertiban | : 4 Kali |
| 4. Jumlah Kejadian Kriminal | |
| a. Pencurian dan Perampokan | : 0 Kasus |
| b. Perkosaan | : 0 Kasus |
| c. Pembunuhan | : 0 Kasus |
| d. Penipuan | : 0 Kasus |
| e. Perkelahian Massal | : 0 Kasus |
| f. Narkotika dan Obat Terlarang | : 0 Kasus |

F. LINGKUNGAN HIDUP

- | | |
|---|------------|
| 1. Wabah Penyakit Menular | : 0 Kasus |
| 2. Jumlah Pos Bencana Alam | : 0 Buah |
| 3. Tim Tanggap dan Siaga Bencana (TAGANA) | : 0 Tim |
| 4. Jumlah Kejadian Bencana | : 0 Kali |
| - Gempa Bumi | : 0 Kali |
| - Tsunami | : 0 Kali |
| - Banjir Bandang | : 0 Kali |
| - Kebakaran Hutan | : 0 Kali |
| 5. Jumlah Lokasi Pencemaran Tanah | : 0 Lokasi |
| 6. Jumlah Pembalakan Liar | : 0 Kasus |
| 7. Jumlah Pos Hutan Lindung | : 0 Buah |

BAB IV

PERKEMBANGAN DESA

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk

| Jumlah | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Jumlah penduduk tahun ini | 1.334 orang | 1.197 orang |
| Jumlah penduduk tahun lalu | 1.320 orang | 1.184 orang |
| Persentase perkembangan | 98,95% | 98,91% |

B. Jumlah Keluarga

| Jumlah | KK Laki-laki | KK Perempuan | Jumlah Total |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jumlah Kepala Keluarga tahun ini | 790 KK | 29 KK | 819 KK |
| Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu | 750 KK | 30 KK | 780 KK |
| Persentase Perkembangan | 9,49% | 10,34% | 95,23% |

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran

| Kelompok Usia | Jumlah (Orang) |
|---|-------------------|
| 1. Penduduk Usia 18-56 Tahun | 1720 |
| 2. Penduduk Usia 18-56 Tahun Yang Bekerja | 1630 |
| 3. Penduduk Usia 18-56 Tahun Yang Belum / Tidak Bekerja | 90 |
| 4. Penduduk Usia 0-6 Tahun | 92 |
| 5. Penduduk Usia Sekolah 7-17 Tahun | 168 |
| 6. Penduduk Usia di atas 56 Tahun | 13 |
| 7. Angkatan Kerja | 705 |

B. Kesejahteraan Keluarga (Analisis DDK)

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Jumlah keluarga prasejahtera | 167 keluarga |
| 2. Jumlah keluarga sejahtera 1 | 450 keluarga |
| 3. Jumlah keluarga sejahtera 2 | 145 keluarga |
| 4. Jumlah keluarga sejahtera 3 | 53 keluarga |
| 5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | 4 keluarga |
| 6. Total jumlah kepala keluarga | 819 keluarga |

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

| Sektor | Jumlah Jenis Sektor Usaha (Jenis) | Nilai Produksi Tahun Ini (Rp) | Nilai Bahan Baku (Rp) | Nilai Bahan Penolong (Rp) | Biaya Antara (Rp) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| A. Sektor Pertambangan dan Galian | - | - | - | - | - |
| B. Subsektor Kerajinan | - | - | - | - | - |
| C. Sektor Industri Pengolahan | - | - | - | - | - |
| 1. Subsektor Industri Pakaian | - | - | - | - | - |
| 2. Subsektor Industri Pangan | - | - | - | - | - |
| 3. Industri Pengolahan Migas | - | - | - | - | - |
| 4. Industri Pengolahan Non Migas | - | - | - | - | - |
| 5. Industri | - | - | - | - | - |
| D. Subsektor Kehutanan | - | - | - | - | - |

| Sektor | Jumlah Jenis Usaha | Jumlah Transaksi | Nilai Aset (Rp) | Nilai Produksi (Rp) | Nilai Transaksi (Rp) | Nilai Biaya (Rp) | Nilai Biaya Lainnya (Rp) | Jumlah Pendapatan (Rp) |
|--|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| I. Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran | | | | | | | | |
| I.1. Subsektor Perdagangan Besar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I.2. Subsektor Perdagangan Eceran | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I.3. Subsektor Hotel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I.4. Subsektor Restoran | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J. Sektor Bangunan/Konstruksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | | | | | | | | |
| K.1. Subsektor Bank | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K.3. Subsektor Sewa Bangunan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K.4. Subsektor Jasa Perusahaan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L. Sektor Jasa-Jasa | | | | | | | | |
| L.1. Subsektor Jasa Pemerintahan Umum | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L.2. Subsektor Jasa Swasta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L.3. Subsektor Jasa Hiburan Dan Rekreasi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L.4. Subsektor Jasa Perorangan Dan Rumah Tangga | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M.Sektor Angkutan Dan Komunikasi | | | | | | | | |
| M.1. Subsektor Angkutan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M.2. Subsektor jasa Penunjang angkutan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M.3. Subsektor Komunikasi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N. Sektor Listrik, Gas & Air Minum | | | | | | | | |
| N.1. Subsektor Listrik | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.2. Subsektor Gas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.3. Subsektor Air Minum | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NILAI TOTAL PENDAPATAN DOMESTIK DESA / KELURAHAN BRUTO DARI SEMUA SEKTOR (% total nilai produksi dan transaksi terhadap total biaya yang dikeluarkan dari semua sektor) | | | | | - | - | - | - |

IV. PENDAPATAN PERKAPITA

A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha

| Sektor Usaha | Jumlah Rumah Tangga (Keluarga) | Jumlah Anggota Rumah Tangga (Orang) | Jumlah Rumah Tangga Buruh (Keluarga) | Jumlah Anggota Rumah Tangga Buruh (Orang) | Jumlah Pendapatan Perkapita (Rp) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|
| 1. Pertanian | 490 | 944 | 44 | 1324 | 150.000 |
| 2. Perkebunan | 490 | 433 | 595 | 1785 | 150.000 |
| 3. Peternakan | 6 | 6 | 6 | 6 | 150.000 |
| 4. Perikanan | 5 | 20 | 5 | 20 | 150.000 |
| 5. Kerajinan | 3 | 15 | 3 | 15 | 150.000 |
| 6. Pertambangan | - | - | - | - | - |
| 7. Kehutanan | - | - | - | - | - |
| 8. Industri Kecil, Menengah dan Besar | 142 | 142 | 142 | 142 | 250.000 |
| 9. Jasa dan Perdagangan | 34 | 102 | 34 | 102 | 250.000 |

B. Pendapatan Rill Keluarga

| | |
|---|--------------------|
| 1. Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 819 |
| 2. Jumlah Anggota Keluarga (Orang) | 1715 |
| 3. Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga (Rp) | 150.000 |
| 4. Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang Bekerja (Rp) | 257.250.000 |
| 5. Jumlah Total Pendapatan Keluarga (Rp) (3+4) | 257.400.000 |
| 6. Rata-rata Pendapatan Peranggota keluarga (Rp) (5/(1+2)) | 101,578,53 |

V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR

| Sektor Mata Pencaharian | Jumlah Pemilik Usaha (Orang) | Jumlah Pemilik Usaha Perorangan (Orang) | Jumlah Buruh/ Karyawan/ Pengumpul (Orang) |
|------------------------------------|------------------------------|---|---|
| 1. Pertanian | 5 | 5 | 5 |
| 2. Perkebunan | 250 | 250 | 750 |
| 3. Peternakan | 2 | 2 | 5 |
| 4. Perikanan | 15 | 15 | 15 |
| 5. Kehutanan | - | - | - |
| 6. Pertambangan dan Bahan Galian C | - | - | - |
| 7. Perdagangan | 34 | 34 | 34 |

| Sektor Mata Pencaharian | Jumlah (Orang) |
|--|----------------|
| 8. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga | |
| • Montir | 6 orang |
| • Tukang batu | - orang |
| • Tukang kayu | 15 orang |
| • Tukang sumur | 5 orang |
| • Pemulung | - orang |
| • Tukang jahit | 3 orang |
| • Tukang kue | 12 orang |
| • Tukang anyaman | 7 orang |
| • Tukang rias | 5orang |
| • Pengrajin industri rumah tangga lainnya | 56orang |
| • | |
| 9. Sektor Industri Menengah dan Besar | |
| • Karyawan perusahaan swasta | 58orang |
| • Karyawan perusahaan pemerintah | -orang |
| • Pemilik Perusahaan | -orang |

| | |
|---|-----------|
| ● | |
| 10. Sektor Jasa | |
| ● Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan | -orang |
| ● Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan | -orang |
| ● Pemilik usaha informasi dan komunikasi | - orang |
| ● Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi | - orang |
| ● Kontraktor | -orang |
| ● Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata | -orang |
| ● Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata | -orang |
| ● Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya | -orang |
| ● Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya | -orang |
| ● Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran | 25 orang |
| ● Pegawai Negeri Sipil | 65orang |
| ● TNI | - orang |
| ● POLRI | 2 orang |
| ● Dokter swasta | -orang |
| ● Bidan swasta | - orang |
| ● Perawat swasta | - orang |
| ● Dukun/paranormal/supranatural | - orang |
| ● Jasa pengobatan alternative | -orang |
| ● Dosen swasta | - orang |
| ● Guru swasta | - orang |
| ● Pensiunan TNI/POLRI | -orang |
| ● Pensiunan | 5 orang |
| ● Pensiunan swasta | -orang |
| ● Pengacara | - orang |
| ● Notaris | - orang |
| ● Jasa Konsultasi Manajemen dan Teknis | -orang |
| ● Seniman/artis | -orang |
| ● Mengurus Rumah Tangga | 689orang |
| ● Sopir | 10 orang |
| ● Buruh migran Perempuan | -orang |
| ● Buruh migran laki-laki | - orang |
| ● Usaha jasa pengerah tenaga kerja | -orang |
| ● Wiraswasta lainnya | orang |
| ● Tidak mempunyai mata pencaharian tetap | -102orang |
| ● Jasa penyewaan peralatan pesta | - orang |
| ● | |

VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

| A. ASET TANAH | | Jumlah (Orang) | |
|---|--|----------------|------|
| • Tidak memiliki tanah | | 25 | |
| • Memiliki tanah antara 0,10-0,2 ha | | - | |
| • Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha | | - | |
| • Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha | | - | |
| • Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha | | 299 | |
| • Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha | | 201 | |
| • Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha | | - | |
| • Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha | | - | |
| • Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha | | - | |
| • Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha | | 1200 | |
| • Memiliki tanah antara 1,00- 5,0 ha | | 414 | |
| • memiliki tanah antara 5,00- 10 ha | | 368 | |
| • Memiliki tanah lebih dari 10 ha | | 27 | |
| • Jumlah total penduduk | | 2534 | |
| | | | |
| B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM | | Orang | Unit |
| • Memiliki ojek | | — | - |
| • Memiliki becak | | - | - |
| • Meimiliki cidemo/andong/dokar | | - | - |
| • Memiliki kapal motor | | - | - |
| • Memiliki bus | | - | - |
| • Memiliki mini bus | | 150 | 150 |
| • Memiliki helikopter dan atau pesawat | | - | - |
| • | | | |
| | | | |
| C. ASET SARANA PRODUKSI | | Jumlah (Orang) | |
| • Memiliki penggilingan padi | | - | |
| • Memiliki tractor | | -3 | |
| • Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian | | - | |
| • Memiliki kapal penangkap ikan | | - | |
| • Memiliki alat pengolahan hasil perikanan | | - | |
| • Memiliki alat pengolahan hasil peternakan | | - | |
| • Memiliki alat pengolahan hasil Perkebunan | | - | |
| • Memiliki alat pengolahan hasil hutan | | - | |
| • Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan | | — | |
| • Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata | | - | |
| • Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa Perdagangan | | - | |

| | |
|--|-----------------------|
| • Memiliki alat produksi dan pengolah hasil Industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah | 6 |
| • Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri Migas | - |
| | |
| D. ASET PERUMAHAN | |
| Jenis Rumah | Jumlah (Rumah) |
| RUMAH MENURUT DINDING | |
| Tembok | 715 |
| Kayu | 50 |
| Bambu | - |
| Tanah liat | - |
| Pelepah kelapa/lontar/gebang | - |
| Dedaunan | - |
| | |
| RUMAH MENURUT LANTAI | |
| Keramik | 715 |
| Semen | 50 |
| Kayu | - |
| Tanah | - |
| | - |
| | |
| RUMAH MENURUT ATAP | |
| Genteng | 250 |
| Seng | - |
| Asbes | 515 |
| Beton | - |
| Bambu | - |
| Kayu | - |
| Daun lontar/gebang/enau | - |
| Daun ilalang | - |
| | |

VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

| Jenis Aset | Jumlah (Keluarga) |
|--|-------------------|
| • Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya | 2524 |
| • Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya | 2530 |

| | |
|---|-----|
| • Jumlah keluarga memiliki mobil dan sejenisnya | 150 |
| • Jumlah keluarga memiliki perahu bermotor | 4 |
| • Jumlah keluarga memiliki kapal barang | - |

| | |
|--|-------------|
| • Jumlah keluarga memiliki kapal penumpang | - |
| • Jumlah keluarga memiliki kapal pesiar | - |
| • Jumlah keluarga memiliki helicopter | - |
| • Jumlah keluarga memiliki pesawat terbang | - |
| • Jumlah keluarga memiliki ternak besar | - |
| • Jumlah keluarga memiliki ternak kecil | 15 |
| • Jumlah keluarga yang memiliki hiasan emas/berlian | 1900 |
| • Jumlah keluarga yang memiliki buku tabungan bank | 15000 |
| • Jumlah keluarga yang memiliki buku surat berharga | - |
| • Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat deposito | 5 |
| • Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah | 300 |
| • Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat bangunan | 250 |
| • Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri besar | - |
| • Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri menengah | - |
| • Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri kecil | - |
| • Jumlah keluarga memiliki usaha perikanan | - |
| • Jumlah keluarga memiliki usaha peternakan | 3 |
| • Jumlah keluarga memiliki usaha Perkebunan | 2500 |
| • Jumlah keluarga memiliki usaha pasar swalayan | - |
| • Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar swalayan | - |
| • Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar tradisional | - |
| • Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar desa | - |
| • Jumlah keluarga memiliki usaha transportasi/pengangkutan | - |
| • Jumlah keluarga yang memiliki aset telekomunikasi | - |
| • Jumlah keluarga yang memiliki saham di Perusahaan | - |
| • | - |
| • Jumlah Keluarga seluruhnya | 2534 |

VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT

| | |
|---|-----------------------|
| A. Tingkat Pendidikan Penduduk | Jumlah (Orang) |
| • Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin | 25 |

| | |
|--|------|
| ● Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak | 43 |
| ● Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental | 3 |
| ● Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat | 430 |
| ● Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat | 1058 |
| ● Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat | 430 |
| ● Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat | 123 |
| ● Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat | 321 |

| | |
|--|------|
| ● Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat | 40 |
| ● Jumlah penduduk tidak tamat SLT/ Sederajat | 1232 |
| ● Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat | 332 |
| ● Jumlah penduduk sedang D-1 | - |
| ● Jumlah penduduk tamat D-1 | 20- |
| ● Jumlah penduduk sedang D-2 | - |
| ● Jumlah penduduk tamat D-2 | - |
| ● Jumlah penduduk sedang D-3 | - |
| ● Jumlah penduduk tamat D-3 | 33 |
| ● Jumlah penduduk sedang S-1 | 78 |
| ● Jumlah penduduk tamat S-1 | 65 |
| ● Jumlah penduduk sedang S-2 | - |
| ● Jumlah penduduk tamat S-2 | 5 |
| ● Jumlah penduduk tamat S-3 | 1 |
| ● Jumlah penduduk sedang SLB A | - |
| ● Jumlah penduduk tamat SLB A | - |
| ● Jumlah penduduk sedang SLB B | - |
| ● Jumlah penduduk tamat SLB B | - |
| ● Jumlah penduduk sedang SLB C | - |
| ● Jumlah penduduk tamat SLB C | - |
| ● Jumlah penduduk cacat fisik dan mental | 3 |
| ● % Penduduk buta huruf [(1): jumlah penduduk] x 100% | - |
| ● % Penduduk tamat SLTP/ sederajat [(3): jumlah penduduk] x 100% | - |
| | |
| B. Wajib belajar 9 tahun | |
| 1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun | 54 |
| 2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah | 54 |
| 3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah | - |
| | |
| C. Rasio Guru dan Murid | |

| | |
|---|-----|
| 1.Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak | 4 |
| 2.Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak | 43 |
| 3.Jumlah guru SD dan sederajat | 24 |
| 4.Jumlah siswa SD dan sederajat | 150 |
| 5.Jumlah guru SLTP dan sederajat | 25 |
| 6.Jumlah siswa SLTP dan sederajat | 125 |
| 7.Jumlah guru SLTA/sederajat | 15 |
| 8.Jumlah siswa SLTA/sederajat | 120 |
| 9.Jumlah siswa SLB | - |
| 10. Jumlah guru SLB | - |

| | |
|--|---|
| | |
| D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat | |
| Jumlah perpustakaan desa/kelurahan (Unit) | 1 |
| Jumlah taman bacaan desa/kelurahan (Unit) | 1 |
| Jumlah perpustakaan keliling (Unit) | - |
| Jumlah sanggar belajar (Unit) | - |
| Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah (Kegiatan) | - |
| Jumlah kelompok belajar Paket A (Kelompok) | - |
| Jumlah peserta ujian Paket A (Orang) | - |
| Jumlah kelompok belajar Paket B (Kelompok) | - |
| Jumlah Peserta ujian Paket B (Orang) | - |
| Jumlah kelompok belajar Paket C (Kelompok) | - |
| Jumlah peserta ujian Paket C (Orang) | - |
| Jumlah lembaga kursus keterampilan (Unit) | - |
| Jumlah peserta kursus keterampilan (Orang) | - |

IX. KESEHATAN MASYARAKAT

| | |
|--|-----------------------|
| A. Kualitas Ibu Hamil | Jumlah (Orang) |
| Jumlah ibu hamil | 25 |
| Jumlah ibu hamil diperiksa di Posyandu | 25 |
| Jumlah ibu hamil diperiksa di Puskesmas | — |
| Jumlah ibu hamil diperiksa di Rumah Sakit | - |
| Jumlah ibu hamil diperiksa di Dokter Praktek | - |
| Jumlah ibu hamil diperiksa di Bidan Praktek | - |
| Jumlah ibu hamil diperiksa di Dukun Terlatih | - |
| Jumlah kematian ibu hamil | - |
| Jumlah ibu hamil melahirkan | - |

| | |
|--|---|
| Jumlah ibu nifas | - |
| Jumlah kematian ibu nifas | - |
| Jumlah ibu nifas hidup | - |
| | |
| B. Kualitas Bayi | |
| Jumlah keguguran kandungan | - |
| Jumlah bayi lahir | 7 |
| Jumlah bayi lahir mati | - |
| Jumlah bayi lahir hidup | - |
| Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan | - |
| Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan | - |
| Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg | - |

| | |
|---|-----------------------|
| Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | |
| | |
| C. Kualitas Persalinan | |
| Tempat Persalinan | |
| | |
| Tempat persalinan Rumah Sakit Umum | - |
| Tempat persalinan Rumah Bersalin | - |
| Tempat persalinan Puskesmas | - |
| Tempat persalinan Polindes | ada |
| Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak | - |
| Tempat persalinan rumah praktek bidan | - |
| Tempat praktek dokter | - |
| Rumah dukun | - |
| Rumah sendiri | - |
| Pertolongan Persalinan | |
| Jumlah Persalinan ditolong Dokter | - |
| Jumlah persalinan ditolong bidan | ada |
| Jumlah persalinan ditolong perawat | ada |
| Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin | - |
| Jumlah persalinan ditolong keluarga | - |
| | |
| D. Cakupan Imunisasi | Jumlah (Orang) |
| Jumlah Bayi usia 2 bulan | - |
| Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 | - |
| Jumlah bayi usia 3 bulan | - |
| Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 | - |

| | |
|--|----|
| Jumlah bayi usia 4 bulan | 2 |
| Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 | 2 |
| Jumlah bayi 9 bulan | 3 |
| Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak | 3 |
| Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar | 5 |
| | |
| E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB | |
| Pasangan Usia Subur | |
| Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun | 41 |
| Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun | 46 |
| Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun | - |
| Jumlah pasangan usia subur (Pasangan) | 43 |
| Keluarga Berencana | |

| | |
|--|-----|
| Jumlah akseptor KB | 900 |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik | - |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral | - |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom | - |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil | - |
| Jumlah pengguna metode vasektomi/MOP | - |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi/MOW | - |
| Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah | - |
| Jumlah pengguna metode KB obat tradisional | - |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode IUD | - |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode Implant | - |
| Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB | - |

F. Wabah Penyakit

| Jenis Wabah | Jumlah Kejadian Tahun Ini | Jumlah Meninggal (Orang) |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Muntaber | - | - |
| 2. Demam Berdarah | - | - |
| 3. Kolera | - | - |
| 4. Polio | - | - |
| 5. Cikungunya | - | - |

| | | |
|-----------------|---|---|
| 6. Flu Burung | - | - |
| 7. Busung Lapar | - | - |
| 8. Kelaparan | - | - |
| | | |

| G. Angka Harapan Hidup | Jumlah (Tahun) |
|---|---------------------------|
| Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan | |
| Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota | |
| Angka Harapan Hidup Provinsi | |
| Angka harapan Hidup Nasional | |

| H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih | Jumlah (Keluarga) |
|---|------------------------------|
| 1.Jumlah keluarga menggunakan sumur gali | 694 |
| 2.Jumlah keluarga pelanggan PAM | 125 |
| 3.Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan | - |
| 4.Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa | - |
| 5.Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran | - |

| | |
|--|------------------|
| 6.Jumlah keluarga menggunakan hidran umum | - |
| 7.Jumlah keluarga menggunakan air Sungai | - |
| 8.Jumlah keluarga menggunakan embung | - |
| 9.Jumlah keluarga yang menggunakan mata air | - |
| 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut | - |
| 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | - |
| Total jumlah keluarga | 819 |
| | |
| | |
| I. Perilaku hidup bersih dan sehat | |
| Kebiasaan buang air besar | |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat | 760 |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan | - |
| Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan | - |
| Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum | - |
| | |
| Pola makan | (✓= Ada) |
| Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali | tidak ada |

| | |
|--|-----------------------|
| Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali | ada |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali | ada |
| Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali | tidak ada |
| Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali | tidak ada |
| | |
| Kebiasaan berobat bila sakit | |
| Dukun Terlatih | Tak ada |
| Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu | banyak |
| Obat tradisional dari dukun pengobatan alternative | Tak ada |
| Paranormal | Tak ada |
| Obat tradisional dari keluarga sendiri | Tak ada |
| Tidak diobati | Tak ada |
| | |
| J. Status Gizi Balita | Jumlah (Orang) |
| Jumlah Balita | 26 bayi |
| Jumlah Balita bergizi buruk | - bayi |
| Jumlah Balita bergizi baik | 26 bayi |
| Jumlah Balita bergizi kurang | - bayi |
| Jumlah Balita bergizi lebih | 26 bayi |

K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini

| Jumlah penyakit | Jumlah penderita (Orang) | Di rawat di | | |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | Rumah | Rumah Sakit | Puskesmas |
| Jantung | - | - | - | - |
| Lever | - | - | - | - |
| Paru-paru | - | - | - | - |
| Kanker | - | - | — | — |
| Stroke | - | - | - | - |
| Diabetes Melitus | - | - | - | - |
| Ginjal | - | - | - | - |
| Malaria | - | - | - | - |
| Lepra/Kusta | - | - | - | - |
| HIV/AIDS | - | - | - | - |
| Gila/stress | - | - | - | - |
| TBC | - | - | - | - |
| ISPA | - | - | - | - |
| Asma | - | - | - | - |
| | | | | |

| L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat | |
|--|----------------|
| Jumlah MCK Umum (Unit) | tidak ada |
| Jumlah Posyandu (Unit) | 1 |
| Jumlah kader Posyandu aktif (Orang) | 13 |
| Jumlah pembina Posyandu (Orang) | 3 |
| Jumlah Dasawisma | - |
| Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif (Orang) | - |
| Jumlah kader bina keluarga balita aktif (Orang) | 12 |
| Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif (Orang) | 2 |
| Buku rencana kegiatan Posyandu | Diisi / k |
| Buku data pengunjung Posyandu | Diisi /k |
| Buku kegiatan pelayanan Posyandu | Diisi k |
| Buku administrasi Posyandu lainnya (Jenis) | absensi |
| Jumlah kegiatan Posyandu (Jenis) | timbangan bayi |
| Jumlah kader kesehatan lainnya (Orang) | 13 |
| Jumlah kegiatan pengobatan gratis (Jenis) | 12 |
| Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN (Jenis) | abate |
| Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan (Jenis) | gotong royong |
| . (Jenis) | |

X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

| A. Konflik SARA | Jumlah (Kasus) | Korban Luka (Orang) | Korban Mening gal (Orang) | Keru gian Mate rial (Rp) | Jumlah Rumah Rusak | Jumlah Sarana/ Prasara na Rusak | Jumlah Pelaku Yang Diadili |
|---|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| Kasus konflik pada tahun ini | - | - | - | - | - | - | - |
| Kasus konflik SARA pada tahun ini | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah (Rp) | - | - | - | - | - | - | - |

| B. Perkelahian | Jumlah (Kasus) |
|--|---------------------------|
| Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini | - |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa | - |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah | - |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material | - |
| Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum (Orang) | - |
| | |
| C. Pencurian | |
| Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini | - |
| Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat | - |
| Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat | - |
| Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api | - |

| | |
|---|---|
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum (Orang) | - |
| | |

| | |
|---|-----------------------|
| D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah | |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat | - |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat | - |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat | - |
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum (Orang) | - |
| | |
| E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan | |
| | Jumlah (Orang) |
| Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi | - |
| Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini | - |
| Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan | - |
| Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang | - |

F. Pemakaian Miras dan Narkoba

| | |
|---|---------|
| Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras | - buah |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras | - orang |
| Jumlah kasus mabuk akibat Miras | - kasus |
| Jumlah pengedar Narkoba | - orang |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba | - orang |
| Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba | - kasus |
| Jumlah kasus kematian akibat Narkoba | - kasus |
| Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hokum | - orang |
| Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hokum | - orang |

G. Prostitusi

| | |
|--|---------|
| Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat | - Orang |
| Lokalisasi prostitusi | /tidak |
| Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) | - buah |
| Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi | -kasus |
| Jumlah pembinaan pelaku prostitusi | -Kali |
| Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi | - Kali |

H. Pembunuhan

| | |
|--|---------|
| Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini | - Orang |
|--|---------|

| | |
|--|---------|
| Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat | - Kasus |
| Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat | - Kasus |
| Jumlah kasus bunuh diri | -Kasus |
| Jumlah Kasus Yang Diproses secara hokum | -Kasus |

I. Penculikan

| | |
|--|---------|
| Jumlah kasus penculikan | -Kasus |
| Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat | -Kasus |
| Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat | - Kasus |
| Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hokum | -Kasus |

J. Kejahatan seksual

| | |
|---|---------|
| Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini | - Kasus |
| Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini | -Kasus |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum Negara | - Kasus |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat | - Kasus |
| Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks | -Unit |

| K. Masalah Kesejahteraan Sosial | Jumlah (Orang) |
|---|-----------------------|
| Jumlah gelandangan | - |
| Jumlah pengemis jalanan | - |
| Jumlah anak jalanan dan terlantar | - |
| Jumlah manusia lanjut usia terlantar | - |
| Jumlah orang gila/stress/cacat mental | - |
| Jumlah orang cacat fisik | - |
| Jumlah orang kelainan kulit | - |
| Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan | - |
| Jumlah rumah dan kawasan kumuh (Unit) | - |
| Jumlah panti jompo (Unit) | - |
| Jumlah panti asuhan anak (Unit) | - |
| Jumlah rumah singgah anak jalanan (Unit) | - |
| Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota | - |
| Jumlah penghuni bantaran Sungai | - |
| Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api | - |
| Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya | - |
| Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitive | - |
| Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun | 11 |

| | |
|--|----|
| Jumlah anak piatu 0–18 tahun | 11 |
| Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun | 2 |
| Jumlah janda | 55 |
| Jumlah duda | 62 |
| Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran | - |
| Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat | - |
| Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat | - |

| | |
|--|-----|
| Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat | - |
| Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang | ada |
| Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga | ada |
| Jumlah penduduk eks NAPI | - |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir | - |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi | - |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana Tsunami | - |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi | - |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah | - |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan | - |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor | - |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan | - |
| Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan | - |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih | - |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus | - |
| Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh | - |
| Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk | - |
| Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman | - |

| L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Jumlah (Kasus) |
|---|---------------------------|
| Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri | - |
| Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami | - |
| Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak | - |
| Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua | - |
| Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya | - |
| | |
| M. Teror dan Intimidasi | |
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan | - |

| | |
|---|---|
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan | - |
| Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk | - |
| Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini | - |
| Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada Masyarakat | - |
| Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal | - |

N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta

| | |
|--|------------|
| Organisasi Siskamling | Ada/ |
| Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat | Ada/ |
| Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda | 12 RT |
| Jumlah anggota Hansip dan Linmas | 5 orang |
| Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda | Ada/k |
| Buku anggota Hansip dan Linmas | absensi is |
| Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta | -Unit |
| Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah | rondakn |
| Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan | 3 Pos |

XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara

| | |
|--|------------|
| Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara | 1 Jenis |
| Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara | 1 Kegiatan |
| Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika | 1 Jenis |
| Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika | 1 Kegiatan |
| Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya | 1 Jenis |
| Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya | 1 Kegiatan |
| Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri | -Kasus |
| Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi | -Orang |
| Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi | 00orang |
| Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan | -Kasus |
| Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga | -Kasus |

| | |
|--|--------|
| Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini | -Kasus |
| Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan | -Orang |
| Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini | -Kasus |
| Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar Negara | -Kasus |
| Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini | -Kasus |

| | |
|---|--------|
| Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. | -Kasus |
| Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya | -Kasus |
| Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah | -Kasus |
| Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan | -Kasus |
| Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain | -Kasus |

B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi

| | |
|--|----------------|
| Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan | 2Jenis |
| Jumlah Wajib Pajak | 750orang |
| Target PBB | 53.000.000Rp,- |
| Realisasi PBB | 50 % |
| Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB | 1Tindakan |
| Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan | -Jenis |
| Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan | -Orang |
| Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan | -Rp |
| Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan | -% |
| Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan | -Jenis |
| Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan | -Rp - |
| Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan | - % |

| | |
|---|---------|
| Jumlah kasus pungutan liar | - Kasus |
| Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar | - Kasus |
| | |

C. Partisipasi Politik

1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum

| | |
|--|-------------|
| Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih | 1.999 orang |
| Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu | 1.999 orang |
| Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik | - Orang |
| Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini | 3 partai |
| Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini | -partai |

| | |
|--|--------------|
| Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan | 10 orang |
| Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu | 1.999orang |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil | 1.999pemilih |

2. Pemilihan Kepala Daerah

| | |
|---|--------------|
| Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih | 1.999Orang |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu | 1.999Pemilih |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu | 1.999Pemilih |

3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan

| | |
|--|---|
| Penentuan Jabatan Kepala Desa | 1. Dipilih masyarakat secara langsung |
| | 2. Dipilih oleh perwakilan Masyarakat |
| | 3. Ditunjuk Pemerintah Tingkat Atas |
| | 4. Diangkat turun temurun oleh masyarakat setempat |
| Penentuan Sekretaris Desa | 1. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota |
| | 2. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota |
| | 3. Diusulkan oleh Kepala Desa, Dipilih, Diangkat dan Ditetapkan oleh Bupati/Walikota |
| Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun | 1. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta disahkan Camat |

| | |
|--|--|
| | 2. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta dilaporkan ke Camat |
| | 3. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Camat/Kepala Distrik/Sebutan lain |
| Masa jabatan Kepala Desa | 6 tahun |
| Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan | 1. Ditunjuk dan diangkat oleh Camat sesuai Delegasi Kewenangan dari Bupati/Walikota |
| | 2. Ditunjuk dan diangkat oleh Bupati/Walikota secara langsung |

4. Pemilihan BPD

| | |
|-----------------------|--|
| Jumlah anggota BPD | 7 orang |
| Penentuan anggota BPD | 1. Dipilih masyarakat secara langsung |
| | 2. Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat |
| | 3. Ditunjuk oleh Kepala Desa/Camat dan unsur lain |
| | 4. Disahkan melalui keputusan Bupati/Walikota |
| | |
| Pimpinan BPD | 1. Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung |
| | 2. Dipilih oleh Kepala Desa dan setuju Camat |

| | |
|----------------------------------|--|
| | 3. Ditunjuk Camat |
| | 4. Dipilih oleh rakyat secara langsung dari para anggota BPD |
| Pemilikan kantor/ruang kerja BPD | /tidak |
| Anggaran untuk BPD | Ada/ |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Produk keputusan BPD tahun ini | Keputusan BPD |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

| | |
|---|---------------------------------|
| Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan | Ada |
| Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD | 1. Perdes |
| | 2. Keputusan Kepala Desa |

| | |
|--|--|
| | 3. Keputusan Camat |
| | 4. Belum diatur |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan | 9 unit organisasi |
| | |
| Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK | 1. Keputusan Lurah |
| | 2. Keputusan Camat |
| | . unit organisasi |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan | |
| | 1. Dipilih oleh rakyat secara langsung |
| Pemilihan pengurus LKD/LKK | 2. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah |
| | 3. Ditunjuk dan Diangkat oleh Camat |
| | |
| Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya | 1. Dipilih oleh rakyat secara langsung |
| | 2. Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/LKK |
| | 3. Ditunjuk dan diangkat oleh |

| | |
|---|-------------------------------------|
| | Kepala Desa/ Lurah |
| | 4. Ditunjuk dan Diangkat oleh Camat |
| Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK | Aktif/ |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK | 12 Kegiatan |
| Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK | Aktif / |
| Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK | 3 Kegiatan |
| Alokasi anggaran untuk LKD/LKK | Ada |
| Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya | Ada/ |
| Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK | tidak |
| Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD | kurang memadai |
| Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK | 100% |
| Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota | 1. Ada dan terisi |

| | |
|--|---|
| LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK | 2. Tidak ada atau belum terisi semuanya |
| Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK | Berfungsi |

C. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan

| | |
|--|-------|
| Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan | 4kali |
| Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan | 100 % |
| Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan | 100% |
| Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan | 50% |
| Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan | 0% |
| Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan forum Musrenbang Partisipatif | Ya |
| Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan | Ya |
| Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif | Ya/ |
| Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan | 65% |
| Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa | 75% |
| Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah | 75% |

| | |
|---|------------|
| kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan | |
| Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel | 2 kegiatan |
| Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) | Ada |
| Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K) | Ada/ |
| Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan | Ada/ |

| | |
|--|------------|
| Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi | 3 kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang | 3 kegiatan |

2. Peran serta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

| | |
|---|------------|
| Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang | 100 % |
| Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota | 100% |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa | 3 kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah | - kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang | -% |
| Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan | 100% |
| Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan | 100% |
| Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat | 100% |
| Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada | Ada |
| Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. | Ada/ |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah | -kasus |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan | -kasus |

| | |
|---|-----------|
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum | - kasus |
| Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan | 1Jenis |
| Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan | -kegiatan |

| | |
|---|-----------|
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota | 1kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi | 1kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN | 3kegiatan |

3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk

| | |
|--|--------|
| Jumlah kelompok arisan | -buah |
| Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh | orang |
| Ada tidaknya dana sehat | -Ada |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah | Ada/ |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah | Ada/ |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus | /tidak |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana | Ada/k |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha | /tidak |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun | Ada/ |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya | Ada/ |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan | Ada/ |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian | Ada |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan | Ada/ |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi | Ada/ |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya | Ada/ |
| Ada tidaknya kerjasama antar Desa/Kelurahan | /tidak |
| Ada tidaknya penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan | Ada/ |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong dalam penyelesaian konflik di setiap desa/kelurahan oleh masyarakat sendiri | Ada/ |
| Ada tidaknya gotong royong dalam menolong keluarga tidak mampu dan fakir miskin di desa dan kelurahan | Ada/ |
| Ada tidaknya kegiatan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa | Ada/ |
| Kegiatan gotong royong dalam penanggulangan bencana | Ada/ |

| | |
|--|-----------|
| Kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong | Ada/tidak |
|--|-----------|

4. Adat Istiadat

| | |
|--|---------|
| Adat istiadat dalam perkawinan | Aktif/ |
| Adat istiadat dalam kelahiran anak | Aktif/t |
| Adat istiadat dalam upacara kematian | Aktif/ |
| Adat istiadat dalam pengelolaan hutan | Aktif/t |
| Adat istiadat dalam tanah pertanian | Aktif/ |
| Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai | /tidak/ |
| Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga | Aktif |
| Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam | Aktif/ |
| Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya | Aktif |
| Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinan bagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar | Aktif/ |

5. Sikap Dan Mental Masyarakat

| | |
|---|---------|
| Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan | -jenis |
| Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar | -jenis |
| Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah | tidak |
| Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah | tidak |
| Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal | /tidak |
| Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga | 2 jenis |
| Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga | 2jenis |
| Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga | 2jenis |
| Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. | - kasus |
| Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya | -kasus |
| Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya | - kasus |
| Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya | -kasus |
| Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan | /tidak |
| Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan | Ya/ |
| Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada Masyarakat | tidak |
| Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri | /tidak |

| | |
|--|--------|
| Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain | /tidak |
| Etos Kerja Penduduk | |

| | |
|---|-----------------------|
| Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas | Ya |
| Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi | Ya/ |
| Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan | Ya/k |
| Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan | Ya/ |
| Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain | i/rendah |
| Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain | rendah |
| Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota | /tidak |
| Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya | /tidak |
| Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak | /sedang |
| Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan | /rend ah |
| Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen | Tinggi/sedang/rend ah |
| Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu | T/rend ah |
| Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah | /rend ah |
| Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan | /jarang |
| Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan | Tinggi |
| Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya | tidak |
| Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi Masyarakat | /rend ah |

XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN

| | |
|--|--------|
| A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN | |
| Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK | Ada/ |
| Kepengurusan | Aktif/ |
| Jumlah kegiatan | 3Jenis |

| | |
|---|-----------------|
| Buku administrasi lembaga kemasyarakatan | 2Jenis- Terisi/ |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan | 5 Organisasi |
| | |
| B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN | |
| 1. LKMD/LPM ATAU SEBUTAN LAIN | Ada/ |
| Kepengurusan | Aktif/ |
| Buku administrasi | 1Jenis |

| | |
|----------------------------------|----------|
| Jumlah kegiatan | 2Jenis |
| | |
| 2. PKK | Ada/ |
| Kepengurusan | Aktif/ |
| Buku administrasi | 9Jenis |
| Jumlah kegiatan | 12Jenis |
| Kelengkapan organisasi Dasawisma | Lengkap/ |
| Kelengkapan organisasi Pokja | Lengkap/ |
| | |
| 3. Karang Taruna | Ada/ |
| Kepengurusan | Aktif/ |
| Buku administrasi | 1Jenis |
| Jumlah kegiatan | 3Jenis |
| | |
| 4. RT | Ada/ |
| Kepengurusan | Aktif/ |
| Buku administrasi | 1Jenis |
| Jumlah kegiatan | 5Jenis |
| | |
| 5. RW | Ada/ |
| Kepengurusan | Aktif |
| Buku administrasi | 1Jenis |
| Jumlah Kegiatan | 3Jenis |
| | |
| 6. Lembaga adat | Ada/ |
| Kepengurusan | Aktif/ |
| Buku administrasi | -Jenis |
| Jumlah Kegiatan | 2Jenis |
| | |
| 7. BUMDES | Ada/ |
| Kepengurusan | Aktif/ |

| | |
|--|---------|
| Buku administrasi | J3enis |
| Jumlah Kegiatan | 2Jenis |
| | |
| 8. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat | Ada/ |
| Kepengurusan | Aktif/ |
| Buku administrasi | 2 Jenis |
| Jumlah kegiatan | 1Jenis |
| | |
| 9. Posyandu | Ada/ |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Kepengurusan | Aktif/ |
| Buku administrasi | 2 Jenis |
| Jumlah kegiatan | 3Jenis |
| | |
| 10. Kelompok Tani/Nelayan | Ada/ |
| Kepengurusan | Aktif/t |
| Buku administrasi | -Jenis |
| Jumlah kegiatan | 2 Jenis |
| | |
| 11. Organisasi Perempuan | Ada/ |
| Kepengurusan | Aktif/ |
| Buku administrasi | -Jenis |
| Jumlah kegiatan | 3Jenis |
| | |
| 12. Organisasi Pemuda | Ada/ |
| Kepengurusan | Aktif/ |
| Buku administrasi | - Jenis |
| Jumlah kegiatan | 1Jenis |
| | |
| 13. Organisasi Profesi | /Tidak |
| Kepengurusan | /tidak |
| Buku administrasi | -Jenis |
| Jumlah kegiatan | -Jenis |
| | |
| 14. Organisasi Bapak | /Tidak |
| Kepengurusan | /tidak |
| Buku administrasi | J-enis |
| Jumlah kegiatan | -Jenis |
| | |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 15. Kelompok Gotong Royong | Ada/ |
| Kepengurusan | Aktif/ |
| Buku administrasi | J-enis |
| Jumlah kegiatan | 5 Jenis |
| | |
| 16. Posyantekdes | Ada/tidak - Aktif/tidak |
| | |
| 17. Organisasi Keagamaan | Ada/ - Aktif/ |
| Jumlah kegiatan | -Jenis |
| | |

| | |
|--|--------------------|
| 18. | Ada/ |
| Kepengurusan | Aktif/t |
| Buku administrasi | . -Jenis |
| Jumlah kegiatan | . 3Jenis |
| Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Peraturan Desa |
| Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan Kelurahan | Peraturan Daerah/t |
| Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan | Peraturan Desa/ |

XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan

| | |
|---|---------------------|
| Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini | Rp 2.126.208.427,00 |
| Sumber Anggaran | |
| APBD Kabupaten/Kota | Rp 55.000.000,00 |
| Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota | Rp 89.099.872,00 |
| Bantuan Pemerintah Provinsi | Rp 0,00 |
| Bantuan Pemerintah Pusat | Rp 858.696.000,00 |
| Pendapatan Asli Desa | Rp 10.000.000 |
| Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp 0,00- |
| Alokasi Dana Desa | Rp 967.216.522,00 |
| Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan | Rp 144.185.000,00- |
| Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat | Rp 2.011.033,00 |
| Jumlah Belanja Publik/belanja Pembangunan | Rp 1.070.817.436,00 |
| Jumlah Belanja Aparatur/pegawai | Rp 1.055.390.991,00 |

B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah

| | |
|--|-----------|
| Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD | Ada/ |
| Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada Masyarakat | 1 jenis |
| Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa | Diterima/ |
| Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota | Diterima/ |
| Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada Masyarakat | - jenis |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah | -kasus |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala | - kasus |

| | |
|------------|--|
| desa/lurah | |
|------------|--|

C. Prasarana dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

| | |
|--|---------|
| 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | |
| Gedung Kantor | Ada/t |
| Jumlah ruang kerja | 4Ruang |
| Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya | Ada/ |
| Listrik | Ada |
| Air bersih | Ada/ |
| Telepon | Ada/t |
| | |
| 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor | |
| Jumlah mesin tik | -buah |
| Jumlah meja | 12 buah |
| Jumlah kursi | 60 buah |
| Jumlah almari arsip | 5 buah |
| Komputer | 6Unit |
| Mesin fax | - Unit |
| Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa | 1unit |
| Buku Data Perangkat Desa/Kelurahan | Ada |
| Perangkat Desa/Kelurahan | Lengkap |
| Buku Peta Wilayah Desa/Kelurahan | Ada/t |
| Struktur organisasi | Ada/k |
| Kartu uraian tugas | Ada/ |

| | |
|---|-------|
| | |
| 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan | |
| Buku profil desa/kelurahan | Ada/ |
| Buku data Peraturan Desa/Peraturan Daerah | Ada/t |
| Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah | Ada/ |
| Buku administrasi kependudukan | Ada/ |
| Buku data inventaris | Ada/k |
| Buku data aparat | Ada/t |
| Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/milik kelurahan | Ada/ |
| Buku administrasi pajak dan retribusi | Ada/k |
| Buku data tanah | |
| Buku laporan pengaduan masyarakat | |
| Buku agenda ekspedisi | Ada/ |
| Buku profil desa/kelurahan | Ada/k |
| Buku data induk penduduk | Ada/ |

| | |
|---|--------|
| Buku buku data mutasi penduduk | Ada/ |
| Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan | Ada/ |
| Buku registrasi pelayanan penduduk | Ada/ |
| Buku data penduduk sementara | Ada/ |
| Buku anggaran penerimaan | Ada/t |
| Buku anggaran pengeluaran pegawai dan Pembangunan | Ada/t |
| Buku kas umum | Ada/k |
| Buku kas pembantu penerimaan | Ada/k |
| Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan | Ada/ |
| Buku data lembaga kemasyarakatan | Ada/ |
| Buku data pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan | Ada/ |
| Buku data program dan kegiatan masuk desa/kelurahan | Ada/ |
| Buku rencana kerja pembangunan desa/kelurahan | Ada/ |
| Buku rencana pembangunan jangka menengah desa | Ada/tk |
| Buku kader pemberdayaan masyarakat | Ada |
| Buku kegiatan Pembangunan | Ada/t |

| | |
|---|---------|
| Buku inventaris proyek | i/tidak |
| Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan | Ada/t |
| Loket pelayanan | Ada/tk |
| Kotak Pengaduan Masyarakat | Ada/ |
| Papan informasi pelayanan | Ada/ |
| Laporan kinerja tahunan | Ada/ |
| Laporan akhir jabatan/memori jabatan lurah/desa | Ada |
| | |

1. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD

| | |
|--|------------|
| Gedung Kantor | Ada/ |
| Ruangan Kerja | Ada/baik/r |
| Listrik | Ada/ |
| Air bersih | Ada/ |
| Telepon | Ada/ |
| | |
| 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor | |
| Jumlah mesin tik | -buah |

| | |
|---------------------|---------|
| Jumlah meja | 12buah |
| Jumlah kursi | 60 buah |
| Jumlah almari arsip | 6 buah |
| Komputer | 7buah |
| Mesin fax | -buah |
| | |

2.B. Administrasi BPD

| | |
|--|-----------------|
| Buku-buku administrasi keanggotaan BPD | Ada/t |
| Buku agenda BPD | 5 jenis-Terisi/ |
| Buku data kegiatan BPD | Ada/ |
| Buku Sekretariat BPD | Ada/ |
| Buku Data Keputusan BPD | Ada/ |
| | Terisi/t |
| | |

3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN

| | |
|------------------------------------|--------|
| Gedung kantor atau Balai Pertemuan | Ada/k |
| Alat tulis kantor | Aktif/ |

| | |
|--|--------|
| Barang inventaris | -Jenis |
| Buku administrasi | 3Jenis |
| Jenis kegiatan | 3jenis |
| Jumlah pengurus | 5orang |
| Jumlah ruang kerja | 1Ruang |
| Balai Dusun/Lingkungan/sejenisnya | Ada/ |
| Listrik | Ada/ |
| Air bersih | Ada/ |
| Telepon | Ada/ |
| | |
| 3.A. Inventaris dan Alat Tulis Kantor | |
| Jumlah mesin tik | -Buah |
| Jumlah meja | 1Buah |
| Jumlah kursi | 1Buah |
| Jumlah almari arsip | 1Buah |
| Komputer | 1Buah |
| Mesin fax | -Buah |
| | |

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

| | |
|---|-----------|
| Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan | Ada/k |
| Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan | Ada/t |
| Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah | Ada |
| Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan serta BPD | Ada/ |
| Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing | Ada/ |
| Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | 2kegiatan |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | 2kegiatan |
| Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | -kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN | 2jenis |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan | 1kali |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing | -kali |

2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

| | |
|--|-----------|
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan | Ada/ |
| Pedoman bantuan keuangan dari provinsi | Ada/ |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan | Ada/ |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah | Ada/ |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi | 1kegiatan |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan | 1jenis |
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan | -jenis |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan | -jenis |

| | |
|---|-------|
| Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan | Adas |
| Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan | Ada |
| Kegiatan pengembangan sosial budaya Masyarakat | Ada/t |
| Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan | Ada/ |

| | |
|---|---------|
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing | /tidak- |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan | Ada/t |

3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

| | |
|--|---------------|
| Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa | Ada |
| Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa | Ada/- 1jenis |
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa | tidak- |
| Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. | Ada- 4 jenis |
| Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan | Ada/- 1 jenis |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan | Ada/- 1jenis |
| Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa | Ada- 1jenis |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah | Ada/- 1jenis |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota | Ada- 1jenis |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan | Ada/- 1 jenis |
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan | Ada/- 1jenis |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan | Ada/- 1jenis |
| Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD | Ada/ 1jenis |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan | Ada/- 1jenis |
| Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan | Ada 1 jenis |

| | |
|--|---------------|
| Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pasca perlombaan desa dan kelurahan | tidak- |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | Ada/- 1 jenis |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing | /tidak- |
| Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah | Ada/- 2 kali |
| | |

4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan

| | |
|---|-----------------|
| Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | Ada/- 4kali |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan | Ada/- 1 kali |
| Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan | Ada/1- kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa | /tidak- |
| Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan | /tidak- |
| Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan | Ada/ 1 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, | Ada/ |
| fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan | 1 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Ada/ 1 kali |
| Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan | Ada/1 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. | Ada/1 kali |
| Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga | /tidak- |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat | Ada/1 kali |
| Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan | tidak |
| Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat | Ada/1- kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya | Ada/1- kali |
| Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. | Ada/1- kali |
| | |

BAB V

PENUTUP

1. Keberhasilan pelaksanaan Penyusunan Buku Profil ini pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan **konsistensi** Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat desa saling bekerjasama untuk desa membangun sebagaimana komitmen Pemerintah Desa **Jeriji**. Keberhasilan Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan sampai pada Monitoring evaluasi akan menjamin keberlangsungan Pembangunan di Desa.
2. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan muncul manakala komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.
3. Proses Penyusunan Buku Profil Desa adalah benar-benar partisipatif dan berorientasi kebutuhan riil masyarakat yang dilakukan dalam Evaluasi dan perkembangan Desa, mudah-mudahan akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.
4. Dalam penyusunan Buku Profil Desa ini masih banyak kekurangan, saran dan kritik membangun serta solusi yang baik sangat kami butuhkan dalam penyelesaiannya.